

## TURKI DALAM PENCARIAN BENTUK PEMERINTAHAN (Sebuah Catatan Sejarah)

*Oleh:*

**Abd Rahman R**

### Abstract

Turkey was founded by Qayigh Oghus than one child Turkish tribes who inhabit the west Gobi, or local country Mongols and northern regions of China, led by Solomon. Royal Ottoman territory from time to time increasingly expanding to include several regions of three continents, Africa, Asia, and Europe. Kingdom of the Ottoman get the support of a formidable military force. Ottoman empire is one of the oldest Islamic government to survive the experience ups and downs. Pemerintahan Ottoman Empire led by a caliph, who has the power, in addition to religious leaders, as well as head of state, which is subsequently transformed into a republic, the caliph as a religious leader eliminated and also the sultan as the head of state dispensed replaced by a government led by a head of state is called the president. Government of the Ottoman Empire in running government aided by large vizier and some ministers who run government services.

*Keywords: Turkey, Finding Form of Government*

### A. Pendahuluan

Sejarah telah mencatat secara baik tentang kehadiran Islam sebagai suatu agama yang mampu mempersatukan suku bangsa Arab yang beragam suku dan kepercayaan atau agama. Satu suku dengan suku yang lain berperang dalam waktu yang cukup panjang. Sejalan dengan itu, peristiwa demi peristiwa, Islam datang dan berkembang serta mengalami perluasan wilayah di Semananjung Arabia, bahkan umat Islam sampai tersebar di berbagai penjuru dunia, secara perlahan namun pasti. Demikian pula tidak bisa dipungkiri, secara perlahan mundur dan terkesan tak terkendalikan sehingga pemerintahan Islam, selain terpecah-pecah, juga wilayah kekuasaannya jatuh di tangan pihak bangsa lain.

Kerajaan Turki sebagai salah satu Kerajaan Islam yang kuat setelah jatuh Kerajaan Daulat Abbasiyah di Bagdad. Kerajaan inilah yang pertama berdiri setelah Bagdad jatuh, dan paling lama bertahan selain Kerajaan Mughal di India dan Safawi di Persia.<sup>1</sup> Kerajaan Turki Usmani ini merupakan simbol kebangkitan kedua umat Islam, yang dalam perkembangannya kerajaan ini lebih banyak tergodanya oleh masalah politik dan militer. Meskipun Kerajaan Turki Usmani berhasil memajukan dan membangkitkan semangat politik Islam, namun kemajuan-kemajuan yang dicapai tidak secemerlang dengan kemajuan yang dicapai pada masa klasik (650-1250). Kerajaan ini hadir pada dua periode, yaitu periode pertengahan (1250-1800), dan periode modern (1800-sekarang).<sup>2</sup> Jadi Kerajaan Turki Usmani merupakan salah satu mata rantai perjalanan sejarah umat Islam yang mengalami pasang-surut, bahkan dikatakan bahwa Kerajaan Turki Usmani yang sampai kini masih terwariskan, meskipun telah berubah menjadi

<sup>1</sup>Ahmad Syantanawi, *D 'irat al-Ma' rif al-Isl miyah* (Kairo: al-Sya'ab, t.th), h. 171.

<sup>2</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I, (Cet. V; Jakarta: UI Press, 1985), h. 56-58.

negara Republik Turki, namun kerajaan tersebut telah banyak memberikan kontribusi dalam perkembangan Islam yang cukup signifikan dan terus berlanjut sampai sekarang.

Turki sebagai sebuah kerajaan dalam menjalankan pemerintahannya mengalamikan pasang surut, menghadapi berbagai persoalan termasuk persoalan politik, tidak hanya wilayahnya silih berganti antara penaklukan atau wilayahnya jatuh di pihak lain tetapi juga persoalan kehidupan kenegaraan. Politik ketatanegaraan sebagaimana pada masa klasik bersifat khalifah sentries.<sup>3</sup> Khalifah memegang peran penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Rakyat dituntut untuk mematuhi kepala negara.<sup>4</sup>

Seiring dengan perjalanan waktu, keadaan politik muncul berbagai pandangan, yang bukan hanya berbicara tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin, ketaatan rakyat kepada pemimpinnya, juga bentuk dan sistem pemerintahan. Perubahan pandangan membawa dampak terhadap pemerintahan Kerajaan Turki Usmani. Interaksi antara ajaran agama Islam dan dunia modern adalah salah satu yang menjadi faktor membawa perubahan politik dan sosial. Para ahli seperti Micael C. Hudson mengatakan bahwa kebangkitan Islam memperjelas masalah ketidakcocokan yang mendasar antara keinginan yang tampak pada banyak orang Islam, perkembangan politik tidak mungkin terjadi tanpa Islam dan ajaran konvensional dalam ilmu sosial Barat. Demikian pula ia mengatakan bahwa Islam adalah ajaran yang menghambat perkembangan politik.<sup>5</sup>

Pandangan ini mengusik pemerintahan Turki Usmani, termasuk para ulama melakukan perlawanan, tetapi juga ternyata tidak sedikit ulama yang melihat bahwa pandangan itu paling tidak menjadi bahan masukan atau koreksi, sehingga melahirkan pemikir-pemikir modern dan melakukan koreksi terhadap sistem pemerintahan Kerajaan Turki Usmani, bahkan melakukan perubahan yang sangat mendasar, meskipun menimbulkan pro-kontra dan konsekuensi terhadap roda pemerintahan Turki Usmani. Jadi, Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa sejak abad ke-7 hingga abad ke-21, umat Islam telah mempraktikkan kehidupan politik yang beragam bentuk dan sistem pemerintahannya.

## B. Pembahasan

### 1. Proses Berdiri dan Wilayah Pemerintahan Turki

Negara Turki merupakan salah satu wilayah yang pada awalnya diperoleh melalui ekspansi Dinasti Seljuk dan para imigran Turki ke arah barat memasuki Anatolia. Di sekitar wilayah perbatasan yang disengketakan oleh Imperium Bizantium tumbuh sejumlah wilayah yang secara formal menerima kedaulatan Seljuk, tetapi secara *de facto* otonom. Wilayah tersebut terletak dibagian barat laut Anatolia, dekat dengan Bizantium. Wilayah ini terdapat lahan pertanian yang cukup produktif dan luas, serta kota-kota pasar yang sebagian menjadi titik penting rute perdagangan yang melintas dari Iran dan Asia jauh menuju Medetarian.<sup>6</sup> Dengan demikian wilayah tersebut selain strategis, juga menyimpan sejumlah kekayaan alam dan masyarakat yang memiliki karakter yang kuat.

<sup>3</sup>Kekuasaan berada di bawah khalifah yang bertindak sebagai pemimpin agama, juga sebagai pemegang pemerintahan, penyelenggaraan agama, termasuk hukum dan politik di tangan khalifah.

<sup>4</sup>Muhammad Iqbal dan Amin Husen Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontempore* (Cet. I; Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), h. 1.

<sup>5</sup>John L. Esposito (Editor), *Islam and Development Religion and Sociopolitical Change*, terj. A. Rahman Zainuddin, *Identitas Islam pada Perubahan Sosial Politik* (Cet. I; Jakarta: 1986), h. 4.

<sup>6</sup>Albert Hourani, *A History of The Arab Peoples*, terj. Irfan Abu Bakar, *Sejarah Bangsa-bangsa Muslim* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2004), h. 412.

Pendiri Turki adalah suku Qayigh Oghus, salah satu anak suku Turki yang mendiami sebelah barat Gurun Gobi, daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina, yang dipimpin oleh Sulaiman. Untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan Khawirizm pada tahun 1219-1220, Sulaiman dan anggota sukunya pindah ke barat dan meminta perlindungan kepada Jalaluddin. Mereka pergi ke barat (Asia kecil) menetap di sana dan pindah ke Syam dalam rangka menghindari serangan serangan Mongol. Dalam usahanya pindah ke Syam, pemimpin orang-orang Turki mendapat kecelakaan, hanyut di sungai Efrat yang tiba-tiba air pasang karena banjir besar (1228).<sup>7</sup> Ertughril salah seorang dari rombongan tersebut mengambil alih pimpinan untuk melanjutkan perjalanan mereka yang selanjutnya mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Seljuk yang sedang bereperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenangan. Atas jasa baik itu, Sultan menghadiahkan tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Syukud sebagai ibu kota.<sup>8</sup>

Pada tahun 1288/1289, Erthugril meninggal dunia sehingga kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Usman atas restu Sultan Seljuk. Usman memerintah antara tahun 1290 dan 1326. Sebagaimana ayahnya, ia sangat berjasa kepada Sultan Alauddin II karena berhasil menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Broessa. Pada tahun 1230, bangsa Mongol menyerang Kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Seljuk Rum ini terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Usman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah, Kerajaan Usmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertamanya adalah Usman yang disebut Usman I, wilayah kekuasaannya mencakup bekas kekuasaan Dinasti Seljuk.<sup>9</sup> Usman pun memiliki pengalaman berharga dan menjadi pemimpin karena dia penguasa di wilayah itu sebagai perpanjangan tangan Sultan dan menggunakan peluang itu untuk memproklamisikan diri kepada rakyat sebagai raja yang berdiri sendiri, tidak terikat oleh pemerintahan pusat.

Setelah Usman I mengumumkan dirinya sebagai Padiisah al-Usman (raja besar keluarga Usman) tahun 699 H/1300 M, secara perlahan wilayah kerajaan dapat diperluas. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broessa tahun 1317 M, kemudian pada tahun 1326 M, dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Pada masa pemerintahan Orkham 726 -761 H (1326-1359 M), Kerajaan Turki Usmani ini dapat menaklukkan Azmir (Smima) tahun 1327 M, Thawasyanli tahun 1330 M, Uskandar tahun 1338 M, Ankara tahun 1354 M, dan Galipoli tahun 1356 M. Wilayah-wilayah ini adalah bagian benua Eropa yang pertama kali diduduki oleh Kerajaan Turki Usmani.<sup>10</sup> Anatolia dan Balkan adalah wilayah baru yang belum pernah tersentuh dalam gelombang penaklukan Islam pertama dulu.<sup>11</sup>

<sup>7</sup>A. Syafiq Mugni, *Sejarah Kebudayaan di Turki* (Jakarta: Logos, 1997), h. 51,

<sup>8</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 130.

<sup>9</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 130, Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I, h. 45, Dewan redaksi, *Ensiklopedi Islam* (Cet. IX; Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 114.

<sup>10</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 131.

<sup>11</sup>Kamal Sa'id Habib, *al-Akalliy t wa al-Siy sah fi al- Khubрати al-Isl miyah*, terj. Ahmad Fahrurrozi dkk., *Kaum Minoritas dan Politik Negara Islam* (Cet. I; Bogor; Pustaka Thariqul Izzah, 1428 H/2007 M), h.263

Ekspansi wilayah yang dicapai oleh Kerajaan Turki Usmani menunjukkan kekuatan militernya yang kuat dan dukungan masyarakatnya serta kelemahan internal wilayah-wilayah di sekitarnya.

Murad I, pengganti Orkhan berkuasa (761-789 H/1359-1389 M), ia melakukan perluasan wilayah ke benua Eropa, Adrianopel yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan baru, termasuk Macedonia, Sopia, Salonia dan seluruh wilayah bagian Utara Yunani. Sementara itu, Paus mengobarkan semangat perang dengan sejumlah pasukan sekutu Eropa yang dipimpin oleh Sijisman, raja Honggaria. Sultan Bayazid, pengganti Murad I dapat menghancurkan pasukan sekutu Kristen Eropa.<sup>12</sup> Peristiwa ini merupakan catatan sejarah yang amat gemilang bagi umat Islam.

Pada peristiwa Timur Lenk melakukan serangan ke Asia Kecil menyebabkan ekspansi Kerajaan Turki Usmani terhenti beberapa saat, karena terjadi pertempuran yang hebat di Ankara tahun 1402 M. Tentara Kerajaan Turki Usmani mengalami kekalahan dan Sultan Bayazid bersama putranya (Musa) tertawan dan wafat dalam tawanan tahun 1403 M. Kekalahan ini membawa akibat buruk, penguasa-penguasa Seljuk di Asia Kecil melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Turki Usmani, seperti Serbia dan Bulgaria, lalu memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu, putra-putra Bayazid saling berebut kekuasaan. Namun suasana buruk ini berakhir setelah Sultan Muhammad I dapat mengatasinya (1403-1421 M). Sultan Muhammad berusaha keras menyatukan negaranya dan mengembalikan kekuatan dan kekuasaan seperti sedia kala.<sup>13</sup> Kekalahan yang dialami Kerajaan Turki Usmani suatu kewajaran karena tampaknya terdapat embrio yang memperlemah kekuatan internal terbukti setelah kekalahan muncul keluarga raja melakukan perebutan kekuasaan.

Salah satu usaha dalam pemerintahan Kerajaan Turki Usmani membuat aturan dalam rangka mengangkat martabat bagi masyarakat. Pemerintahan Kerajaan Turki Usmani jauh lebih adil dari pemerintahan yang di bawah oleh Bizantium. Saudagar Yunani lebih suka berlayar dengan bendera Kerajaan Turki Usmani dan siap memakai bahasa dan gaya pakaian Usmaniyah. Selain itu, pemerintahan Kerajaan Turki Usmani bukan saja menyingkirkan semua kendala migrasi antara provinsi Asia dan Eropa, bahkan mendorongnya. Migran Kristen selalu diterima dengan baik, direhabilitasi, dan dibantu oleh orang Muslim, bahkan mereka melakukan perkawinan campuran sehingga terjadilah percampuran etnis besar-besaran. Orang Kristen dan orang Muslim bekerja sama dengan harmonis, sementara itu orang Kristen menikmati otonomi dalam urusan internal mereka. Perpindahan agama berlangsung lambat, tetapi menjelang abad ke-16 M, jumlah orang Muslim melebihi orang Kristen. Jauh ke Utara, di Yugoslavia sekarang, kaum muslim menyebar dalam jumlah besar, termasuk di Bosnia, Serbia, Montenegro, Herzegovina dan Kroasia. Penyebaran Islam sangat terbantu oleh banyak orang Bogomile masuk Islam di bawah Muhammad II (855-886 H/1451-1481 M).<sup>14</sup> Kerajaan Turki Usmani semakin mendapatkan simpati dari non Muslim karena kebijakan pemerintahannya yang berbeda dengan penguasa sebelumnya yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

<sup>12</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 131.

<sup>13</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 131.

<sup>14</sup>Ismail al-Faruqi dan Lois Lamy al-Faruqi, *The Utural Atlas of Islam*, terj. Ilyas Hasan *Atlas Budaya, Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang* (Cet. IV; Bandung: Mizan, 2003), h. 256

Sultan Muhammad II dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel tahun 1453 M. Oleh karena Konstantinopel sebagai benteng kerajaan Bizantium telah ditaklukkan, maka mudahlah arus ekspansi Kerajaan Turki Usmani ke benua Eropa. Tetapi ketika Sultan Salim I (1512-1520 M) naik takhta, ia mengalihkan perhatian ke arah Timur dengan menaklukkan Persia, Syria dan Dinasti Mamalik di Mesir.<sup>15</sup> Usaha Sultan Salim I, dikembangkan dan dilanjutkan oleh Sultan Sulaiman al-Qanuni (1520-1566 M). Sultan Sulaiman berhasil menaklukkan Iraq, Belgrado, Pulau Rodhes, Tunis, Budapest dan Yaman. Jadi wilayah Kerajaan Turki Usmani pada masa Sultan Sulaiman al-Qanuni meliputi Asia Kecil, Armenia, Iraq, Syria, Hejaz, dan Yaman di Asia. Mesir, Libia, Tunis, serta Aljazair di Afrika; Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Honggaria dan Rumania di Eropa.<sup>16</sup>

Salim II (1566-1574 M) adalah putra Sulaiman Agung naik takhta menjadi Sultan pertama yang sama sekali tidak tertarik dengan militer dan mencoba menyerahkan bidang ini ke tangan menteri (Mehmed Sokollu), seorang muallaf Serbia dari daerah yang kini bernama Bosnia dan Herzegovina. Pada masa ini penaklukan berjalan terus, pasukan Usmani berhasil menaklukkan Cyprus 1571 M, bahkan warga masyarakat Cyprus merasa dibebaskan dari cengkeraman kaum Katolik yang dilakukan oleh Orang-orang Hungaria dalam rentang waktu yang cukup panjang (berabad-abad).<sup>17</sup> Oleh sebab itu, penaklukan tersebut menjadi andil bagi Kerajaan Turki Usmani karena kehadirannya mendapatkan simpati masyarakat yang merasa terlindungi dan memperoleh kebebasan.

Kemajuan dan perkembangan Kerajaan Turki Usmani yang luas berlangsung dengan cepat. Kerajaan ini mencapai puncak kemegahan pada tahun 1520-1566. Tetapi kerajaan ini juga mengalami kemunduran, kemudian mendapat gelar orang sakit (*the Sick Men*) karena bangsa Turki akhirnya juga lumpuh pada abad ke-19.<sup>18</sup>

Pada akhir abad ke-17 M, menjelang abad ke-19 M, Kerajaan Turki Usmani tidak mampu lagi mempertahankan dirinya menghadapi kekuatan militer Eropa, juga tidak mampu mengelak penetrasi komersial Eropa. Rusia merampas Crimea dan memperkokoh diri di laut Hitam. Sementara Inggris menjadi kekuatan militer dan perdagangan yang tidak tertandingi di laut Tengah. Rusia bermaksud merampas beberapa wilayah Usmani di Balkan dan berhasil menyusup ke laut Tengah dan Inggris menjadikan Kerajaan Turki Usmani sebagai benteng untuk menghadang ekspansi Rusia dan melindungi kepentingan politik dan komersialnya di laut Tengah. Pada masa ini, berlangsung satu abad dalam memperebutkan Kerajaan Turki Usmani yang sedang sakit-sakitan (*the Sick Man*). Situasi kritis bagi Kerajaan Turki Usmani terlindungi oleh keseimbangan kekuatan Eropa.<sup>19</sup> Jadi persetujuan kekuatan Inggris dan Rusia membawa dampak positif terhadap Kerajaan Turki Usmani untuk melakukan pemulihan kekuatan tentaranya.

Perimbangan kekuatan Eropa dan daya ketahanan Kerajaan Turki Usmani kembali teruji dalam peperangan Crimea (1854-1856 M). Rusia melakukan pengaruh dan menyebarkan provokasi di Yerusalem dan melalui protektorasi seluruh warga

<sup>15</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I, h. 84.

<sup>16</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 132.

<sup>17</sup>Hepi Andi Bastoni, *Sejarah Para Khalifah* (Jakarta: Putaka al-Kautsar, 2008), h. 251,253

<sup>18</sup>[http://copyduty.blogspot.com/2011/06/makalah-pmdi-pembaharuan-islam-di-turki.html\(2-11-2011\)](http://copyduty.blogspot.com/2011/06/makalah-pmdi-pembaharuan-islam-di-turki.html(2-11-2011)).

<sup>19</sup>Ira M Lapidus, *A History of Islamic Societies*, terj. Ghufroon A. Mas'adi, *Sejarah Sosial Umat Islam* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 66-67.

Usmani yang beragama Kristen. Usmani, Inggris dan Prancis memasuki laut Hitam dan merebut Sebastopol pada tahun 1855 M. Pihak Rusia dipaksa menarik pasukannya di laut Hitam, tetapi mereka diberi ganti rugi melalui sebuah perjanjian yang menjadikan Rumania sebagai provinsi otonom di bawah pemerintahan Usmani.<sup>20</sup>

Pada tahun 1908 M terjadi krisis politik internal di tubuh Kerajaan Turki Usmani. Austria memanfaatkan kesempatan, mencaplok Bosnia dan Herzegovina. Pada tahun 1912 M, Serbia didukung oleh Rusia sehingga tentara gabungan ini, termasuk Austria mengalahkan Usmani dan merebut seluruh wilayah Usmani yang tersisa di Eropa kecuali wilayah Istanbul. Pada tahun 1913 M, Negara-negara Balkan terlibat peperangan antara mereka sendiri yang memperebutkan pembagian wilayah, sehingga memberi kesempatan bagi Usmani untuk merebut kembali sebagian dari wilayahnya di Thrace. Persaingan antara Serbia dukungan Rusia dan Austria dukungan Jerman yang berlangsung satu tahun, menimbulkan peperangan Eropa bersifat umum, yang pada akhirnya berujung pada Perang Dunia I. Kerajaan Usmani bergabung dengan Austria dan Jerman.<sup>21</sup> Situasi Kerajaan Turki Usmani semakin melemah, karena selain ancaman dari luar, juga ancaman dari dalam dengan terjadinya pembangkangan terhadap pemerintah pusat.

## 2. Bentuk dan Sistem Pemerintahan Turki Usmani

Dinasti Abbasiyah di Bagdad runtuh total pada tahun 1258 M di tangan orang-orang Mongol di bawah pimpinan Hulagu. Umat Islam tidak lagi mempunyai khalifah yang diakui oleh semua umat Islam sebagai lambang persatuan, yang ada adalah kerajaan-kerajaan kecil di daerah yang bergelar sultan. Keadaan ini berlangsung lama sampai muncul Kerajaan Turki Usmani dan mengangkat khalifah yang baru di Istanbul, Turki di abad keenambelas. Pemerintahan ini mengambil bentuk kerajaan (monarki). Raja-rajanya di samping bergelar khalifah, juga memakai gelar sultan.<sup>22</sup> Dengan demikian, pemerintahan Turki Usmani dipimpin oleh seorang khalifah, yang berperan selain sebagai pemimpin agama, juga sebagai kepala negara.

Para pemikir politik Islam pada masa klasik dan pertengahan tidak mempersoalkan kedudukan negara dengan agama, terintegrasi atau terpisah, karena dalam kenya-taannya sistem kekhalifahan mengintegrasikan agama dengan negara. Perbedaan terletak pada pendirian sebuah negara merupakan wajib syar'i atau wajib akal, serta syarat kepala negara.<sup>23</sup> Khalifah sebagai lembaga sentral dalam gagasan dan sistem penyelenggaraan negara.

Menurut Rabi' bentuk pemerintahan yang paling baik adalah monarki, kekuasaan tertinggi dipegang satu orang saja, yaitu raja. Ia menolak pemerintahan aristokrasi, pemerintahan yang berada di bawah pimpinan sekelompok orang terpilih, bangsawan atau ningrat. Ia juga tidak menerima bentuk pemerintahan oligarki. Pemerintahan di bawah kekuasaan kelompok kecil, orang-orang yang

<sup>20</sup>Ira M Lapidus, *A History of Islamic Societies*, terj. Ghufroon A. Mas'adi, *Sejarah Sosial Umat Islam*, h. 67-68.

<sup>21</sup>Ira M Lapidus, *A History of Islamic Societies*, terj. Ghufroon A. Mas'adi, *Sejarah Sosial Umat Islam*, h. 70.

<sup>22</sup>J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Cet. V; Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 178-179.

<sup>23</sup>Komaruddin Hidayat (Editor), *Islam Negara dan Civil Society, gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2005), h. 80.

berpengaruh atas masyarakat. Ia juga tidak membenarkan pemerintahan demokrasi. Kekuasaan tertinggi berada di tangan orang banyak yang menimbulkan kerusuhan dan kerusakan.<sup>24</sup> Kekhawatiran Abi Rabi' terhadap bentuk-bentuk pemerintahan selain raja, yang membuka peluang munculnya gerakan-gerakan provokasi dari kelompok masyarakat yang dapat berujung pada kekacauan dalam masyarakat.

Al-Qur'an memang tidak menetapkan bentuk pemerintahan yang baku, cara atau mekanisme tertentu dalam memilih seorang kepala negara. Karena itu, dalam pentas sejarah ketatanegaraan Islam muncul berbagai model atau cara pengangkatan kepala negara Islam, mulai dari yang dianggap demokratis dan damai sampai kepada cara yang dianggap tidak demokratis, atau dengan cara revolusi berdarah.

Puncak sistem kendali pemerintahan berada di tangan penguasa (khalifah) dan keluarga kerajaan. Otoritas kekuasaan terletak pada keluarga, bukan pada anggota-anggota yang ditunjuk. Tidak ada hukum baku yang mengatur pergantian kekuasaan, yang ada hanyalah tradisi suksesi damai dan pemerintahan yang panjang. Awal abad ke-17 M, penguasa selalu digantikan oleh salah seorang putranya. Setelah itu, yang lazim berlaku adalah manakala seorang penguasa mangkat atau lengser, maka digantikan oleh anaknya yang tertua. Kedudukan di bawah penguasa ditempati oleh *sadr-i azam*, pejabat tinggi (menteri besar). Jabatan ini memiliki kekuasaan di bawah sang penguasa yang dibantu oleh sejumlah *wazir* lain yang mengendalikan militer dan pemerintah provinsi serta pelayanan sipil.<sup>25</sup> Jadi suksesi kepala pemerintahan dilakukan secara tertutup, hanya hubungan kekeluargaan.

Jika pada masa klasik dan pertengahan pemikiran tentang kenegaraan tidak mempersoalkan integrasi agama dengan negara, maka ketika Islam bersentuhan dengan Barat, secara berangsur-angsur muncul gagasan-gagasan baru yang di antaranya mendukung pemisahan agama dan negara. Al-Qur'an dan al-hadist sebagai sumber ajaran Islam tidak menyebutkan secara jelas bentuk pemerintahan yang baik, tetapi hanya menjelaskan prinsip-prinsip etika moral dan norma-norma hukum. Oleh karena itu, umat Islam dibolehkan dan diberi kesempatan untuk memutuskan bentuk kelembagaan negara yang dipandang cocok dengan kondisi zaman.

Pada tahun 1839, Tanzimat muncul sebagai sebuah kelompok yang melakukan gerakan reformasi sosial dan politik yang mengubah kesultanan Turki Usmani dengan mengintegrasikan ke dalam lembaga-lembaga model Barat. Sadik Rifat salah seorang tokoh Tanzimat berpendapat bahwa peradaban dan kemajuan Barat dapat diwujudkan karena ada suasana damai dan hubungan baik antara negara-negara Eropa. Kemakmuran suatu negara bergantung pada kemakmuran rakyat dan kemakmuran rakyat dapat diperoleh dengan menghilangkan pemerintahan absolut, rakyat merasa tidak aman dan tenteram. Hal itu membuat mereka kurang giat berusaha. Demikian pula kejujuran dalam pekerjaan hilang, korupsi banyak dijalankan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum. Kesemuanya ini membawa produktivitas menurun sehingga akhirnya membawa kepada kejatuhan negara.<sup>26</sup> Kekuasaan yang tidak jelas, tugas

<sup>24</sup>Komaruddin Hidayat (Editor), *Islam Negara dan Civil Society, gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, h. 268.

<sup>25</sup>Albert Hourani, *A History of The Arab Peoples*, terj. Irfan Abu Bakar, *Sejarah Bangsa-bangsa Muslim*, h. 414-415.

<sup>26</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Cet. VIII, Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 98.

dan kewenangan penguasa tidak dibatasi oleh undang-undang berdampak buruk terhadap kelangsungan bahkan kemunduran negara Turki. Untuk mengobatinya memerlukan undang-undang dan peraturan yang mengikat para penguasa negara dan harus tunduk kepadanya.

Mustafa Rasyid Pasya sebagaimana Sadik Rifat mempunyai pengaruh yang besar terhadap penguasa sehingga pada masa Abdul Majid mengeluarkan sebuah piagam, *Hatt-i Syerif* (Piagam Gulhane). Piagam itu menjelaskan bahwa pada masa permulaan Kerajaan Usmani, syariat dan undang-undang negara dipatuhi sehingga kerajaan menjadi besar serta kuat dan rakyat hidup dalam kemakmuran. Tetapi seratus lima tahun terakhir, syariat dan undang-undang tak diperhatikan lagi, akibatnya membawa kepada kelemahan dan kemunduran Kerajaan Turki.<sup>27</sup> Kondisi pemerintahan membutuhkan undang-undang yang sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk kondisi sosial masyarakat yang beragam.

Salah satu regulasi urusan negara meniru model Barat dan penetapan prinsip-prinsip kebebasan, persamaan dan persaudaraan antara seluruh rakyat dengan berbagai aliran. Selain itu, juga melakukan gerakan westernisasi negara Turki dengan tiga poin penting, yaitu 1) mengambil sistem Barat dalam regulasi militer, logistik-persenjataan, sistem administrasi dan pemerintahan, 2) mengarahkan masyarakat pada sekularisme dan keluar dari sistem Islam dalam bidang kenegaraan dan kema-syarakatan, dan 3) menuju sentralisasi kekuasaan di Konstatinopel dan daerah-daerah.<sup>28</sup>

Pada tahun 1876, deklarasi UU karena ada keinginan yang kuat, tekanan politik untuk membentuk parlemen yang dipandang keinginan rakyat. Konstitusi tersebut terdiri atas 119 pasal yang selanjutnya disebarkan keseluruh negara untuk diterapkan di seluruh wilayah pemerintahan Turki. Pemilihan anggota parlemen dilakukan pertama kali dalam sejarah pemerintahan Turki Usmani. Tetapi uji coba konstitusi ini tidak berumur lebih dari satu tahun karena Sultan Abdulhamid membubarkan par-lemen sampai waktu yang tidak ditentukan. Hal ini tidak menimbulkan reaksi di dalam negeri karena konstitusi itu tidak didukung oleh opini publik atau kekuatan rakyat, hanya sekelompok kecil dari kalangan pemikir. Konstitusi tersebut digantung selama lebih dari 30 tahun.<sup>29</sup> Pada tahun 1908, revolusi Turki Muda (koalisi pen-dukung reformasi, termasuk kaum sekuler dan nasionalis) memaksa Abdulhamid II menghidupkan kembali parlemen dan menjalankan lagi konstitusi 1876.<sup>30</sup> Jadi, pemerintahan Turki menghadapi gejolak politik karena keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan sistem pemerintahan yang semakin melemah.

Setelah kalah dalam Perang Dunia I, Kerajaan Turki dibagi-bagi sebagaimana yang termuat dalam perjanjian *Sevres* yang ditandatangani pada Agustus 1920, Istanbul di duduki oleh pasukan Britania dan Prancis. Mustafa Kemal tampil meng-galang sebuah gerakan nasional Turki, mengadakan

<sup>27</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, h. 99.

<sup>28</sup>Kamal Sa'id Habib, al-Akalliy t wa al-Siy sah fi al- Khubрати al-Isl miyah, terj. Ahmad Fahrurrozi dkk., *Kaum Minoritas dan Politik Negara Islam*, h. 517, Asep Gunawan, *Artikulasi Islam Kultural dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persasda, 2004), h.134.

<sup>29</sup>Kamal Sa'id Habib, al-Akalliy t wa al-Siy sah fi al- Khubрати al-Isl miyah, terj. Ahmad Fahrurrozi dkk., *Kaum Minoritas dan Politik Negara Islam*, h. 537-538.

<sup>30</sup>John L. Esposito (Editor Kepala), *The Oxford Encyclopedia of Islam Word*, terj. Eva Y.N dkk., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, jilid VI, ( Cet. II; Bandung, Mizan, 2002), h. 345, Lihat pula, Rana Bokhari dan Muhammad Seddon, *Ensiklopedia Islam*, jilid III, (Jakarta: Erlangga, t.th.), h. 107.



perlawanan dalam perang kemerdekaan Turki (1919-1923) dan berhasil meraih kemenangan.<sup>31</sup> Kerajaan Turki semakin tampak kelemahan dalam tubuh pemerintahan yang memerlukan reformasi sistem pemerintahan.

Mustafa Kemal sebagai pemimpin gerakan nasional yang ingin melihat pemerintahan Turki yang kuat dan maju, maka ia melakukan perubahan struktur lembaga kenegaraan yang diusulkan kepada Dewan Nasional, yang dibentuk pada tahun 1920 untuk menghapuskan lembaga kesultanan dan disetujui dewan pada tahun 1922 dan sebagai gantinya dibentuk Republik Turki pada bulan Oktober 1923 dan Mustafa Kemal dipilih sebagai Presidennya. Meskipun dilakukan perubahan bentuk pemerintahan, namun tetap agama resmi negara adalah agama Islam. Dalam pada itu khalifah masih tetap memegang kekuasaan yang melahirkan kerancuan dalam ketatanegaraan, maka pada tanggal 3 Maret 1924, lembaga kekhalifahan pun dihapus oleh Dewan Nasional sekaligus berakhir pemerintahan bentuk khilafah di dunia Islam.<sup>32</sup> Dengan demikian pemerintahan Turki menjadi pemerintahan yang berbentuk republik pertama di dunia Islam sebagai akibat dari perubahan sosial politik yang berkembang, terutama pengaruh kemajuan yang diraih oleh Barat.

### C. Birokrasi Pemerintahan Turki dalam Penyelenggaraan Ketatanegaraan

Pada periode awal, sebagian besar kendali pemerintahan berada di tangan para kemandan militer, para anggota kelompok penguasa negara yang tergabung ke dalam kerajaan dan penduduk perkotaan yang terdidik. Menjelang abad ke-16, para petinggi pemerintahan-para wazir, komandan militer, dan gubernur provinsi- sebagian besar diambil dari keluarga penguasa. Anggota rumah tangga istana berasal dari kalangan militer yang direkrut melalui *devsirme*, para budak yang dibawa dari Kaukasus, atau anggota keluarga penguasa sebelumnya. Semua lapisan memiliki peluang untuk masuk ke dalam rumah tangga istana yang selanjutnya mereka dilatih secara baik untuk melayani segala kepentingan istana.<sup>33</sup> Jadi, pemerintahan Turki berusaha melanggengkan kekuasaannya melalui penguatan birokrasi istana dengan cara menampung berbagai kalangan komunitas masyarakat, yang juga menimbulkan kesan positif karena tidak membeda-bedakan latar belakang etnis dan agama.

Pemerintahan Turki adalah pemerintahan yang menentang rasisme dan tidak membeda-bedakan rakyatnya berdasarkan suku bangsa, melainkan berdasarkan agamanya. Pembedaan ini pun hanya secara fungsional, bukan secara parsial, karena orang-orang yang agamanya berbeda dengan agama negara resmi, mereka juga adalah rakyat yang terikat dengan hak dan kewajiban. Orang-orang yang berbeda akidah dan agamanya merupakan bagian dari rakyat pemerintahan Turki, sebagaimana warga negara lainnya dalam hal hak dan kewajiban.<sup>34</sup> Jadi pemerintahan Turki mengakui fluralitas dan memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap setiap warganya tanpa memperhatikan perbedaan, suku atau agama.

<sup>31</sup>John L. Esposito (Editor Kepala), *The Oxford Encyclopedia of Islam Word*, terj. Eva Y.N dkk., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, h. 107.

<sup>32</sup>J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 180-181.

<sup>33</sup>Albert Hourani, *A History of The Arab Peoples*, terj. Irfan Abu Bakar, *Sejarah Bangsa-bangsa Muslim*, h. 418

<sup>34</sup>Kamal Sa'id Habib, *al-Akalliy t wa al-Siy sah fi al- Khubrati al-Isl miyah*, terj. Ahmad Fahrurrozi dkk., *Kaum Minoritas dan Politik Negara Islam*, h. 347

Setiap warga negara, baik Muslim atau pun non-Muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum dalam hal keterlibatan dalam militer, administrasi, pajak, penerimaan di lembaga pendidikan serta pekerjaan di sektor publik.<sup>35</sup> Dalam skala yang besar pada abad ke 15 dan ke-16, rekrutmen aparat pemerintah diambil dari kalangan pemuda Kristen, yang selanjutnya memeluk Islam. Mereka dilatih dan dididik di sekolah istana raja yang didirikan oleh Mehmed II dan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Selain itu, juga di kalangan budak atau tawanan anggota, atau “pemberontak” yang datang ke sultan mendapatkan perlakuan yang sama. Seluruh anggota kelas pemerintah membentuk kebangsawanan Turki-Islam, muallaf dari Kristen membentuk *devsirme* yang terpisah, sehingga kelompok ini berebut kekuasaan serta gengsi. Pemerintahan Turki pun menempuh jalan dengan memosisikan setara (seimbang) guna mengendalikan dan memanfaatkan keduanya. Anggota kelas pemerintahan dibagi menjadi lembaga-lembaga menurut fungsinya. Lembaga kerajaan (istana) di Istana *Topkapi Sarayi* terdiri atas dua cabang: Layanan Dalam (*ender n*), biasa disebut Harem, bertugas menghasilkan, memelihara, melatih serta menghibur sultan, yang personilnya terdiri atas sultan sendiri, isterinya, selir, anak-anak, serta budak; Layanan Luar (*bir n*) dipimpin oleh wazir besar (*sadr-i azam*) dan mencakup pejabat lain yang memegang jabatan wazir dan gelar pasha (*pasa*), yang bertemu sebagai dewan (*divan*) kerajaan dalam bagian *kubbealti* dari halaman istana kedua bertugas mengawasi serta memimpin sisa sistem Usmaniyah untuk sultan. Lembaga pencatat (*kalemiye*), membentuk perbendaharaan sultan dan mencakup semua “pria berpena” (*ehl-I kalem*), melakukan tugas administratif kelas pemerintahan, terutama menilai dan mengumpulkan pajak, membuat pengeluaran, serta menuliskan perintah kerajaan dan sebagian besar dokumen administratif lain. Lembaga militer (*siyfiye*) mencakup pria “berpedang” (*ehl-i seyf*), bertugas memperluas dan membela kesultanan serta menjaga ketertiban dan keamanan: pasukan berkuda (*sipahi*), yang diperintah sebagian besar oleh anggota bangsawan Turki-Islam; angkatan darat Janissari (*yeniseri*), senjata militer kaum *devsirme*, yang merupakan bagian terpenting pasukan Usmaniyah.<sup>36</sup> Dengan demikian, pembinaan lembaga pemerintah dan unsur-unsurnya memperkuat administrasi dan pelayanan publik.

Untuk memperkuat militer kerajaan dibentuk pula pasukan garnisun, angkatan laut dan polisi kota. Pasuka angkatan laut di bawah komando admiral besar yang dijadikan gubernur Aljazair serta mengendalikan tugas bea di sebagian besar pelabuhan Laut Tengah untuk memperoleh pendapatan yang diperlukan untuk pembiayaan pasukan, seperti pasukan artileri (*topciyan*) dan angkatan lainnya.<sup>37</sup>

Kerajaan Turki, juga menaruh perhatian terhadap pembinaan agama yang di bawah sebuah lembaga agama atau budaya (*ilmiye*) yang dipimpin oleh *Seyhulislam* (*syaiikh al-Isl m*), beranggotakan “pria berpengetahuan” (*ehl-I ilm, ulema*), yang terdiri tidak saja imam atau orang yang mengabdikan di masjid, tetapi juga hakim (*qadi*) dan mufti, serta orang lain dalam dunia budaya (orang yang digelari *efendi*), demikian pula

<sup>35</sup>John L. Esposito (Editor Kepala), *The Oxford Encyclopedia of Islam Word*, terj. Eva Y.N dkk., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, h. 346.

<sup>36</sup>John L. Esposito (Editor Kepala), *The Oxford Encyclopedia of Islam Word*, terj. Eva Y.N dkk., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, h. 132.

<sup>37</sup>John L. Esposito (Editor Kepala), *The Oxford Encyclopedia of Islam Word*, terj. Eva Y.N dkk., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, h. 132.

anggota kelas pencatat, yang juga harus menjalani pelatihan agama.<sup>38</sup> Lembaga agama mengatur pula urusan-urusan non Muslim di dalam negara, memberikan kepada mereka hak kemerdekaan untuk memilih pemimpin keagamaan mereka, hak menjalankan urusan-urusan khusus mereka dalam pengajaran, hak peradilan (pidana dan sipil) maupun pajak di bawah pimpinan mereka. Setiap kelompok non Muslim adalah golongan yang merdeka, yang mempunyai aliran keagamaan yang beragam. Lembaga ini berfungsi sebagai fasilitator antara negara dengan pengikut golongan-golongan keagamaan.<sup>39</sup> Jadi, peran negara terhadap agama sangat dominan dalam rangka membina umat beragama, dan antara agama dan negara. Hal ini dapat berjalan lama, tetapi dalam perkembangan berikutnya, terutama memasuki zaman modern terjadi perubahan mendasar dengan menghilangkan determinasi negara terhadap agama.

Perubahan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal sangat radikal, melakukan pembaruan Turki modern di atas pijakan westernisasi, sekularisasi, dan nasionalisme. Namun demikian, menurut Harun Nasution sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Iqbal bahwa sekularisasi yang dilakukannya itu tidak sampai menghilangkan agama dan Kemal tidak berhasil membuat Turki lepas sama sekali dari ikatan agama karena rakyatnya masih memegang teguh Islam, karena selain keberagaman masyarakat Turki yang mendalam tidak serta merta dihapuskan, demikian pula negara juga membutuhkan lembaga-lembaga Islam.<sup>40</sup> Jadi sekularisasi bukan berarti meninggalkan agama, tetapi pemisahan urusan agama dan politik, meninggalkan simbol-simbol agama atas nama kepentingan politik atau justifikasi politik.

#### D. Kesimpulan

1. Turki didirikan oleh Qayigh Oghus dari salah satu anak suku Turki yang mendiami sebelah Barat gurun Gobi, atau daerah Mongol dan daerah Utara negeri Cina, yang dipimpin oleh Sulaiman. Kerajaan Turki Usmani dari masa ke masa wilayahnya semakin bertambah luas sampai meliputi beberapa wilayah tiga benua, Afrika, Asia, dan Eropa. Kerajaan Turki Usmani mendapatkan dukungan dari kekuatan militer yang tangguh. Kerajaan Turki Usmani merupakan salah satu pemerintahan Islam yang paling lama bertahan walaupun mengalami pasang surut.
2. Pemerintahan Turki Usmani dipimpin oleh seorang khalifah, yang memiliki kekuasaan, selain pemimpin agama, juga sebagai kepala negara, yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi negara republik, khalifah sebagai pemimpin agama ditiadakan dan juga sultan sebagai kepala negara ditiadakan diganti dengan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala negara disebut presiden.
3. Pemerintahan Turki Usmani dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh wazir besar dan beberapa menteri yang menjalankan pelayanan pemerintahan.

<sup>38</sup>John L. Esposito (Editor Kepala), *The Oxford Encyclopedia of Islam Word*, terj. Eva Y.N dkk., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, h. 132.

<sup>39</sup>Kamal Sa'id Habib, al-Akalliy t wa al-Siy sah fi al- Khubrati al-Isl miyah, terj. Ahmad Fahrurrozi dkk., *Kaum Minoritas dan Politik Negara Islam*, h. 398.

<sup>40</sup>Kamal Sa'id Habib, al-Akalliy t wa al-Siy sah fi al- Khubrati al-Isl miyah, terj. Ahmad Fahrurrozi dkk., *Kaum Minoritas dan Politik Negara Islam*, h. 113.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bastoni, Hepi Andi. *Sejarah Para Khalifah*. Jakarta: Putaka al-Kautsar, 2008.
- Bokhari, Raana dan Muhammad Seddon. *Ensiklopedia Islam*. Jilid III, (Jakarta: Erlangga, t.th.
- Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Islam*. Cet. IX; Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Esposito, John L. (Editor). *Islam and Development Religion and Sociopolitical Change* diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin dengan judul *Identitas Islam pada Perubahan Sosial Politik*. Cet. I; Jakarta: 1986.
- Esposito, John L. (Editor Kepala). *The Oxford Encyclopedia of Islam* Word diterjemahkan oleh Eva Y.N dkk. dengan judul *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Jilid VI, cet. II; Bandung, Mizan, 2002.
- Faruqi, Ismail al- dan Lois Lamya al-Faruqi. *The Ultural Atlas of Islam* diterjemahkan oleh Ilyas Hasan dengan judul: *Atlas Budaya, Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*. Cet. IV; Bandung: Mizan, 2003.
- Gunawan, Asep. *Artikulasi Islam Kultural dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Habib, Kamal Sa'id. *al-Akalliy t wa al-Siy sah fi al- Khubrati al-Isl miyah* diterjemahkan oleh Ahmad Fahrurrozi dkk. dengan judul: *Kaum Minoritas dan Politik Negara Islam*. Cet. I; Bogor; Pustaka Thariqul Izzah, 1428 H/2007 M.
- Hidayat, Komaruddin (Editor). *Islam Negara dan Civil Society, gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2005.
- Hourani, Albert. *A History of The Arab Poeples* diterjemahkan oleh Irfan Abu Bakar dengan judul *Sejarah Bangsa-bangsa Muslim*. Cet. I; Bandung: Mizan, 2004.
- [Http://copyduty.blogspot.com/2011/06/makalah-pmdi-pembaharuan-islam-di-turki.html](http://copyduty.blogspot.com/2011/06/makalah-pmdi-pembaharuan-islam-di-turki.html), 2-11-201.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husen Nasution. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontempore*. Cet. I; Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies* diterjemahkan oleh Ghuftron A. Mas'adi dengan judul *Sejarah Sosial Umat Islam*. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Mugni, A. Syafiq. *Sejarah Kebudayaan di Turki*. Jakarta: Logos, 1997.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jilid I, cet. V; Jakarta: UI Press, 1985.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Cet. V; Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syantani, Ahmad. *D 'irat al-Ma' rif al-Isl miyah*. Kairo: al-Sya'ab, t.th.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakaarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.